



Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus *Detox Campaign* oleh Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok

Farin Trianda

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Environmental issue in China is a concern for international relations actors, including non-state actors. Greenpeace is an international non-government organization that acts to solve global environmental problems in China. This research will explain an environmental campaign, *Detox Campaign*, by Greenpeace to solve water pollution problem in China. This research aims to explain challenges that Greenpeace has faced in conducting *Detox Campaign* in China. In conducting *Detox Campaign*, Greenpeace has faced challenges that contribute to Greenpeace's failure to change China's government policy. This research used Global civil society as a theoretical framework, to explain external factors as challenges for Greenpeace in conducting *Detox Campaign* in China. This research found that water pollution issue is not a main priority in China and Greenpeace is still constrained by their limited organizational capacity. Greenpeace has limited political space in terms of policy advocacy that caused failure of *Detox Campaign* in China.

Keywords: *China, Greenpeace, Detox Campaign, global civil society*

Pendahuluan

Pencemaran air merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok dan turut menjadi perhatian dari organisasi non-pemerintah internasional, yaitu Greenpeace. Persatuan Bangsa-Bangsa memasukkan negara Republik Rakyat Tiongkok ke dalam daftar negara dengan permasalahan krisis air yang serius (Wong, 2013). Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah pembuangan limbah yang berasal dari tingginya aktivitas industri (Manjula, 2016, World Bank, 2007). Pada tahun 2011, Greenpeace mengeluarkan publikasi berupa laporan yang berjudul *Dirty Laundry* sebagai hasil dari penelitian terkait pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah beracun di Republik Rakyat Tiongkok. Melalui publikasi *Dirty Laundry*, Greenpeace menyatakan bahwa industri tekstil yang menyebabkan pencemaran air di Republik Rakyat Tiongkok memiliki hubungan dengan beberapa merk pakaian ternama (Greenpeace, 2011). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace, beberapa perusahaan pakaian ternama yang melakukan proses produksi di Republik Rakyat Tiongkok telah menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping terhadap lingkungan (Greenpeace, 2011). Publikasi laporan *Dirty Laundry* tersebut menjadi awal dari *Detox Campaign* yang dilaksanakan oleh Greenpeace. Melalui laporan *Dirty Laundry*, Greenpeace melaksanakan *Detox Campaign* yang memiliki fokus sasaran yakni terhadap pemerintah, perusahaan, dan masyarakat internasional.

Akan tetapi, dalam melaksanakan *Detox Campaign* pada tahun 2011-2014, Greenpeace masih belum berhasil dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Tidak berhasilnya Greenpeace dalam memberikan pengaruh

terhadap pemerintah melalui *Detox Campaign* ini dilihat dari belum terpenuhinya sistem manajemen bahan kimia yang sesuai dengan rekomendasi Greenpeace dan kualitas air Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2011-2014. Melalui *Detox Campaign*, Greenpeace meminta pemerintah untuk mengadopsi komitmen untuk menghilangkan semua bahan kimia berbahaya, dengan seperangkat kebijakan dan peraturan manajemen bahan kimia yang menetapkan: 1. Target jangka pendek atau menengah yang melarang produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya, 2. Daftar dinamis bahan berbahaya yang memerlukan tindakan segera, sehingga bahan kimia berbahaya diganti secara progresif dengan alternatif yang lebih aman, 3. Daftar mengenai pelepasan, emisi, dan kerugian zat berbahaya yang dapat diakses oleh umum, seperti *Pollutant Release and Transfer Register* (www.greenpeace.org).

Pertama, Republik Rakyat Tiongkok belum memiliki kebijakan maupun peraturan berupa penetapan target jangka pendek menengah yang melarang produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Republik Rakyat Tiongkok memiliki program pembangunan nasional, yaitu pembangunan ekonomi dan sosial yang dinamakan dengan *The 12th Year Plan 2011-2015*. Dalam rencana lima tahun tersebut, masih belum terdapat pelarangan terhadap produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya dan lebih memiliki fokus terhadap persoalan pemanasan global, energi, dan pengurangan emisi (APCO Worldwide, 2010, Zhang, Q dan Crooks, R, 2011, KPMG China, 2011). Kedua, Republik Rakyat Tiongkok telah memiliki *Catalogue of Hazardous Chemicals* (2002) dan mengeluarkan *Priority Hazardous Chemicals for Environmental Management* (2014) yang masih bersifat percobaan (*trial*). Dari kedua daftar tersebut, sebagian besar bahan-bahan kimia berbahaya yang disebutkan dalam laporan penelitian Greenpeace belum termasuk ke dalam daftar tersebut dan penemuan bahan kimia pada penelitian Greenpeace tahun 2014 menandakan bahwa bahan kimia belum dihentikan penggunaannya. Ketiga, hingga saat ini masih belum terdapat daftar mengenai pelepasan, emisi, dan kerugian zat berbahaya yang dapat diakses oleh umum, seperti *Pollutant Release and Transfer Register* (PRTR). Selain dilihat dari belum terpenuhinya sistem manajemen kimia yang sesuai dengan rekomendasi Greenpeace, tidak berhasilnya *Detox Campaign* oleh Greenpeace juga dilihat dari kualitas air pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2011-2014, kualitas air baik mengalami penurunan dan kualitas air buruk terus mengalami peningkatan di Republik Rakyat Tiongkok (www.chinawatererrisk.org).

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui penyebab *Detox Campaign* yang dilakukan oleh Greenpeace tidak berhasil dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Kedua, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Greenpeace dalam melaksanakan *Detox Campaign* di Republik Rakyat Tiongkok.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran *global civil society*. *Global civil society* merupakan istilah yang merujuk kepada kelompok advokasi yang mandiri, yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari negara, pemerintah, maupun perusahaan, yang melakukan tindakan kolektif secara sukarela di seluruh perbatasan negara dengan tujuan untuk mengejar apa yang mereka anggap merupakan kepentingan publik yang lebih luas (Price, 2003). Definisi PBB terhadap *Civil Society Organizations* yaitu aktor yang tidak memiliki orientasi terhadap keuntungan secara langsung dan tidak mencari jabatan politik (Bernauer & Gampfer, 2013). Dalam melaksanakan gerakan *global civil society*, para aktor tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat ditemui (Brown & Kalegaonkar, 1999). Tantangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan *global civil society* dapat berbeda-beda dalam setiap negara yang memiliki kondisi politik dan ekonomi, sejarah institusi, dan kontak internasional yang berbeda-beda (Brown & Kalegaonkar, 1999). Berdasarkan Salamon dan Anheier, tantangan yang dihadapi oleh aktor civil society dapat berupa

tantangan eksternal yang terjadi dalam hubungan antar sektor, yakni ruang politik dan regulasi pemerintah (Brown & Kalegaonkar, 1999).

Argumen peneliti dalam penelitian ini adalah penyebab mengapa *Detox Campaign* tidak berhasil memberikan pengaruh terhadap pemerintah adalah dikarenakan negara Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang tertutup. Dalam hal ini, Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang tidak terbuka dan tidak demokratis termasuk dalam pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dapat dikatakan tidak menerima bentuk campur tangan dari pihak luar, termasuk organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace. Dengan demikian, aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi non-pemerintah, termasuk Greenpeace, tidak berhasil memberikan pengaruh terhadap pemerintah.

Pembahasan

Kehadiran Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok dimulai pada tahun 1980-an, yaitu untuk menghentikan uji coba nuklir yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok. Pada masa awal kehadirannya, Greenpeace tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah (Liang, 2006). Yakni para aktivis ditahan, diusir, dan dituduh telah memasuki wilayah secara illegal (Liang, 2006). Greenpeace kemudian secara resmi hadir pada tahun 1997 di Republik Rakyat Tiongkok dan turut aktif dalam berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada. Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok memiliki fokus terhadap isu: perubahan iklim dan energi, polusi udara, bahan kimia beracun, pangan dan pertanian, hutan, dan laut (www.greenpeace.org). Dalam mengatasi permasalahan lingkungan, Greenpeace senantiasa melakukan tindakan dalam berbagai cara termasuk melakukan investigasi atau penelitian, menerbitkan laporan, melakukan kampanye, bekerjasama, mendorong pemerintah dan perusahaan, melibatkan masyarakat, dan melakukan pemantauan (www.greenpeace.org)

Dalam melaksanakan *Detox Campaign*, upaya Greenpeace dapat terbagi ke dalam tiga bagian, yakni *Detox Research*, *Fashion Manifesto* dan demonstrasi publik, dan *Detox Catwalk*. Greenpeace melakukan investigasi terhadap pencemaran air yang diakibatkan oleh industri di Republik Rakyat Tiongkok dengan cara mengambil sampel air pabrik, melakukan wawancara terhadap warga sekitar, dan mengumpulkan bukti degradasi lingkungan dari pencemaran air yang diakibatkan oleh industri (Greenpeace, 2011). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Greenpeace mengungkap persoalan pencemaran air yang terjadi dengan menerbitkan beberapa laporan penelitian, yaitu: 1. *Dirty Laundry I, II, dan III.*, 2. *Toxic Threads I dan II.*, 3. *A Little Story About a Monstrous Mess I dan II*, 4. *A Red Card for Sportswear Brands*, 5. *A Little Story About the Monsters in Your Closet*, dan 6. *Little Monsters: A Field Guide to Hazardous Chemicals*.

Melalui laporan penelitian tersebut, Greenpeace mengungkap bahwa dalam melaksanakan proses produksi pakaian telah digunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Bahan-bahan kimia yang digunakan termasuk dalam kategori berbahaya yakni bersifat bertahan di lingkungan dalam waktu yang lama dan dapat menimbulkan gangguan pada hormon, sistem kekebalan tubuh, sistem reproduksi, dapat menyebabkan dermatitis, dan iritasi saluran pernapasan pada manusia (Greenpeace, 2014). Greenpeace juga mengungkap bahwa pakaian yang menggunakan bahan kimia dalam proses produksinya akan tetap mengeluarkan kandungan bahan kimia saat pakaian tersebut pertama kali di cuci dan mencemari lingkungan (Greenpeace, 2012).

Dalam melaksanakan *Detox Campaign*, Greenpeace menggunakan berbagai foto, video, dan petisi online bernama *Fashion Manifesto* yang mengajak masyarakat untuk

mendorong perusahaan multinasional dan pemerintah untuk menangani pencemaran air yang terjadi dengan menghentikan penggunaan bahan kimia. Dalam mendorong perusahaan untuk menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya, Greenpeace meminta perusahaan pakaian untuk mengadopsi dan mengimplementasi solusi *Detox*, dan melakukan komitmen untuk menghapus penggunaan dan pelepasan semua bahan kimia beracun dari rantai pasokan dan produk global mereka pada tanggal 1 Januari 2020 (www.greenpeace.org). Pada tahun 2013, Greenpeace merilis *Detox Catwalk* sebagai bagian dari *Detox Campaign* yaitu untuk melihat langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan pakaian terhadap komitmen *Detox* mereka.

Dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya, aktor *global civil society* dapat menghadapi tantangan yang berasal dari eksternal yaitu terkait tantangan yang terjadi dalam hubungan antar sektor. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi Greenpeace dalam melaksanakan *Detox Campaign* dan hubungan Greenpeace dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Salah satu penyebab tidak berhasilnya *Detox Campaign* yang dilakukan oleh Greenpeace adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan lingkungan berupa pencemaran air yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah investasi yang diberikan kepada penanganan permasalahan lingkungan.

Tabel 1. Jumlah Investasi Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan di Republik Rakyat Tiongkok 2011-2014

Tahun	GDP per Tahun (100 juta yuan)	Total Investasi Penanganan Pencemaran Lingkungan (100 juta yuan)	Total Investasi Penanganan Pencemaran Industri (10000 yuan)	Total Investasi Penanganan Air Limbah (10000 yuan)
2011	484123.5	7114.0	4434610	1577471
2012	534123.0	8253.5	5004473	1403448
2013	588018.8	9037.2	8496647	1248822
2014	636138.7	9575.5	9976511	1152473

Sumber: *National Bureau of Statistics of China, 2012-2015*

Berdasarkan data tersebut, jumlah persentase investasi yang dikeluarkan untuk penanganan pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun berada di angka yang tidak mencapai 2% dari total GDP. Persentase investasi dari total GDP untuk penanganan pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun yaitu hanya sebesar 1.47% pada tahun 2011, 1.55% pada tahun 2012, 1.54% pada tahun 2013, dan 1.51% pada tahun 2014. Berdasarkan ketua dari *Environmental and Natural Resources Law Research Institute*, Wang Canfa, investasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap penanganan pencemaran lingkungan belum sebanding dengan pembangunan dari Republik Rakyat Tiongkok (www.aljazeera.com, 2013). Berdasarkan Wang Canfa, pemerintah seharusnya mengalokasikan 2.5% - 3% dari total GDP (www.aljazeera.com, 2013). Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pencemaran air mencapai sekitar 240 miliar yuan per tahun, namun jumlah investasi yang diberikan untuk penanganan air limbah hanya mencapai 15 miliar yuan dan mengalami penurunan pertahunnya. (www.en.people.cn, 2015).

Selain jumlah investasi yang masih terbilang kecil, pemerintah daerah di Republik Rakyat Tiongkok lebih memiliki fokus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, yakni pembangunan infrastruktur yang lebih memberikan keuntungan (www.reuters.com, 2014, Schwartz, 2004). Adanya fokus terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Republik Rakyat Tiongkok kemudian menyebabkan rendahnya perhatian terhadap

penanganan pencemaran lingkungan (Schwartz, 2004). Menteri Lingkungan Republik Rakyat Tiongkok, Chen Jining, mengakui bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan dibandingkan dengan perlindungan lingkungan (www.efe.com, 2016).

Selain kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan pencemaran air, sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok juga menjadi salah satu penyebab dari tidak berhasilnya *Detox Campaign* oleh Greenpeace. Sistem politik merupakan struktur politik, hukum, peraturan, regulasi yang diimplementasi dan mengatur kekuasaan pemerintah, hubungan antara negara dan masyarakat di Republik Rakyat Tiongkok (www.china.org.cn). Berdasarkan studi politik, sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok terus dianggap sebagai otoriter (Perinova, 2005). Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang otoriter kemudian menjadi hambatan bagi organisasi non-pemerintah, yakni pemerintah cenderung menggantikan organisasi non-pemerintah yang mandiri dengan organisasi yang kegiatannya dipantau dan berada di bawah kontrol negara (Perinova, 2005).

Melalui regulasi yang berlaku, organisasi non-pemerintah yang melakukan aktivitas di Republik Rakyat Tiongkok harus melakukan sistem manajemen ganda untuk dapat terdaftar secara legal, yakni organisasi non-pemerintah harus melakukan registrasi atau pendaftaran kepada pemerintah dan departemen maupun organ lain yang masih berada di bawah naungan pemerintah, untuk mengawasi pendaftaran dan aktivitas dari organisasi (www.cecc.gov, 2006). Pendaftaran organisasi non-pemerintah juga merupakan alat administratif utama yang digunakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk membatasi, mengendalikan pertumbuhan, dan aktivitas dari organisasi non-pemerintah (Zhan dan Tang, 2011, Perinova, 2005). Adanya keharusan bagi organisasi non-pemerintah untuk melakukan registrasi tersebut kemudian menunjukkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok tetap menginginkan organisasi non-pemerintah untuk berada di bawah naungannya, atau tidak secara sepenuhnya terlepas dari pemerintah dan tidak sepenuhnya independen. Peraturan ini kemudian dapat dilihat sebagai usaha pemerintah untuk mencegah pembentukan organisasi non-pemerintah tumbuh terlalu besar yang dapat menantang negara.

Organisasi non-pemerintah merupakan salah satu sektor yang tidak terlepas dari kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Terkait dengan organisasi non-pemerintah, Partai Komunis Tiongkok meminta untuk meningkatkan kehadiran partai dalam organisasi, dengan tujuan untuk memperkuat organ partai dengan membentuk cabang partai dalam organisasi (www.asianews.it, 2015). Keinginan dari Partai Komunis Tiongkok untuk meningkatkan kehadiran partai dalam organisasi kemudian menandakan bahwa organisasi non-pemerintah masih dalam kontrol dan tidak terlepas dari pengaruh partai tersebut.

Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang disebut sebagai negara yang represif dalam menghadapi berbagai protes terkait isu yang terjadi dan merupakan negara yang memiliki kekurangan dalam hal kebebasan penggunaan media (www.aljazeera.com, 2017). Protes terhadap suatu isu termasuk isu hak asasi manusia maupun isu lingkungan hidup seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti penangkapan, ancaman pembubaran organisasi, dan media sosial yang terbatas (Wu, 2009, www.forbes.com, 2016, www.scmp.com, 2016).

Sistem politik yang mengharuskan organisasi non-pemerintah untuk melakukan registrasi untuk dapat terdaftar secara legal dan negara Republik Rakyat Tiongkok yang represif, kemudian mengakibatkan organisasi non-pemerintah terbagi ke dalam dua jenis organisasi. Berdasarkan Frolic (1997), dalam pemerintahan yang otoriter negara mengalami yang dinamakan dengan “masyarakat sipil ganda”, yaitu masyarakat sipil yang dibentuk oleh negara dan dibentuk oleh rakyat (Perinova, 2005). Organisasi non-pemerintah yang terlihat berani melakukan konfrontasi terhadap pemerintah pada pelaksanaannya tetap berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah,

yaitu tetap berusaha untuk dapat tetap tampil baik terhadap pemerintah agar mendapatkan dukungan terhadap organisasi mereka (Lu, 2005). Sementara itu, organisasi non-pemerintah yang tidak berani melakukan konfrontasi terhadap pemerintah dapat dikatakan tidak ingin menarik perhatian terlalu besar dari pemerintah dan lebih memilih untuk menjalin hubungan yang baik dalam melaksanakan kegiatan (Lu, 2005).

Organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Republik Rakyat Tiongkok mayoritas lebih fokus kepada kegiatan yang bersifat non-politik, seperti edukasi, proyek konservasi, dan perlindungan spesies (Zhan dan Tang, 2011). Sebagian besar organisasi non-pemerintah tidak ingin untuk terlibat dalam advokasi kebijakan, yang termasuk dalam kegiatan yang bersifat politik, dikarenakan kondisi organisasi dan lingkungan politik yang tidak mendukung serta organisasi yang terlalu fokus pada politik dinyatakan tidak dapat bertahan lama (Zhan dan Tang, 2011). Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah kemudian memiliki kegiatan yang dibatasi dan harus mengikuti sistem politik yang ada di Republik Rakyat Tiongkok. Oleh karena itu, banyak organisasi non-pemerintah lebih memilih untuk mengikuti pemerintah dan merelakan kebebasan mereka, termasuk untuk menghindari kegiatan yang mungkin dianggap tidak diinginkan oleh pemerintah.

Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh salah satu direktur kampanye Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok, yaitu Lo Sze-ping, Greenpeace mengalami kesulitan untuk terdaftar secara legal karena sulit mendapatkan pihak pemerintah yang dapat menjadi sponsor dan Greenpeace mendapatkan penolakan dari otoritas perlindungan lingkungan hidup setempat (Edele, 2005). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mann (2013), salah satu anggota Greenpeace menuturkan bahwa membangun hubungan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok merupakan hal yang tidak mudah, yang ditunjukkan dengan adanya ketidaktertarikan dari pemerintah saat bertemu dengan perwakilan anggota Greenpeace (Mann, 2013). Adanya kesulitan untuk terdaftar secara legal sebagai organisasi non-pemerintah kemudian menyebabkan organisasi non-pemerintah, termasuk Greenpeace, untuk melakukan pendaftaran sebagai korporasi agar tetap dapat melakukan aktivitasnya di Republik Rakyat Tiongkok. Pilihan organisasi non-pemerintah, termasuk Greenpeace, untuk melakukan registrasi sebagai korporasi kemudian mengharuskan mereka untuk membayar pajak yang lebih tinggi (Zhan dan Tang, 2011). Namun, status dari organisasi non-pemerintah yang melakukan registrasi sebagai korporasi membatasi kapasitas mereka untuk membangun kepercayaan publik, penerimaan sosial, penggalangan dana dan perekrutan personil, advokasi kebijakan, dan kampanye (Zhan dan Tang, 2011). Hal ini kemudian menandakan bahwa status yang dimiliki Greenpeace kemudian membatasi aktivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan di Republik Rakyat Tiongkok.

Greenpeace berusaha untuk mendorong pemerintah untuk terjadinya perubahan kebijakan melalui advokasi yaitu *Detox Campaign*. Namun, dengan kondisi sistem politik yang ada di Republik Rakyat Tiongkok, Greenpeace memiliki ruang politik yang terbatas dalam melaksanakan aktivitas dan dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah. Sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok dapat dikatakan bertentangan dengan salah satu prinsip dari Greenpeace, yakni independen. Namun, dengan kondisi sistem politik yang ada, dalam melaksanakan *Detox Campaign* Greenpeace harus melaksanakan kegiatan dengan cara yang lebih bersahabat (Parameswari, 2016). Dengan sistem politik yang ada, Greenpeace juga harus berhati-hati dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Hal ini dapat dilihat dari demonstrasi publik dari *Detox Campaign* yang lebih mengarah kepada demonstrasi terhadap perusahaan bukan pemerintah. Melalui *Detox Campaign*, Greenpeace menuntut adanya perubahan kebijakan dari pemerintah namun tidak melakukan aksi protes maupun demonstrasi yang ditujukan langsung terhadap pemerintah.

Kesimpulan

Penyebab *Detox Campaign* tidak berhasil dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah dikarenakan ruang politik yang terbatas. Dalam hal ini, terbatasnya ruang politik yang dihadapi oleh Greenpeace dikaitkan dengan isu pencemaran air yang belum menjadi prioritas dan kondisi sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok. Pencemaran air masih termasuk ke dalam isu yang belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sehingga kemudian upaya *Detox Campaign* yang dilaksanakan Greenpeace menjadi tidak memberikan perubahan.

Dalam melaksanakan *Detox Campaign* Greenpeace lebih memilih cara yang lebih bersahabat. Greenpeace menuntut adanya perubahan kebijakan dari pemerintah namun tidak menunjukkan aksi protes maupun demonstrasi yang diajukan langsung terhadap pemerintah. Hal ini tentunya disebabkan karena kondisi sistem politik yang ada di Republik Rakyat Tiongkok. Jika dibandingkan dengan aktivitasnya di negara lain, Greenpeace cenderung lebih berani dalam memberikan pendapat maupun melaksanakan aktivitasnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat keterbatasan ruang politik bagi Greenpeace dalam melaksanakan *Detox Campaign*.

Terbatasnya ruang politik dan kondisi sistem politik dari Republik Rakyat Tiongkok merupakan hambatan maupun tantangan utama dalam berbagai aktivitas dari organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah masih tidak memberikan kebebasan ruang untuk berpendapat dan untuk beraktivitas bagi organisasi non-pemerintah. Pemerintah juga cenderung masih berupaya untuk melakukan kontrol terhadap organisasi non-pemerintah yang ada.

Referensi

- APCO Worldwide (2010). China's 12th Five Year Plan. *APCO Worldwide*, 1-13.
- Asia News. (2015, September 29). Communist Party to Tighten Grip on NGOs and Religions. Dipetik Maret 17, 2018, dari <http://www.asianews.it>
- Babones, S. (2017, Februari 20). *Red Alert for China's Pollution Protesters*. Dipetik Juli 20, 2017, dari www.aljazeera.com
- Bernauer, T., & Gampfer, R. (2013). Effects of Civil Society Involvement on Popular Legitimacy of Global Environmental Governance. *Global Environmental Change* 23, 439-449.
- Brown, D. L., & Kalegaonkar, A. (1999). *Addressing Civil's Society Challenges: Support Organizations as Emerging Institutions*. Institute for Development Research.
- CECC (2006, Mei 16). *Regulations on the Registration and Management of Social Organizations*. Dipetik November 20, 2017, dari www.cecc.gov
- Chen, K., Stanway, D., Reklef, S., Raybould, A. (2014, Oktober 30). *China's Growth-Obsessed Officials Ignoring Green Policies: Parliament*. Diakses November 20, 2017, dari <https://www.reuters.com>
- China Internet Information Center. *China's Political System*. Diakses Maret 17, 2018, dari <http://www.china.org.cn>
- China Water Risk (2015, Juli 14). *2014 State of Environment Report Review*. Dipetik April 20, 2017, dari www.chinawaterrisk.org
- Duggan, J. (2013, Maret 4). China Comes Clean on Water Pollution. Dipetik Maret 17, 2018, dari <https://www.aljazeera.com>
- Edele, A. (2005). *Non-Government Organizations in China*. Geneva: Centre for Applied Studies in International Negotiations.
- EFE. (2016, Maret 11). *China admits many local governments ignore environmental concerns*. Dipetik Oktober 25, 2017, dari www.efe.com

- Greenpeace. (2011). *Dirty Laundry*. Amsterdam: Greenpeace Internasional.
- Greenpeace. (2012). *Dirty Laundry: Reloaded*. Amsterdam: Greenpeace Internasional.
- Greenpeace. (2014). *A Little Story of Monstrous Mess II*. Amsterdam: Greenpeace Internasional.
- Greenpeace. *Our Actions*. Dipetik Juli 25, 2017, dari www.greenpeace.org/eastasia/campaigns/actions
- Greenpeace. *The Detox Campaign*. Dipetik November 10, 2017, dari www.greenpeace.org
- Greenpeace. *The Detox Catwalk*. Dipetik November 20, 2017, dari www.greenpeace.org
- Hsu, S. (2016, Agustus 4). *China Wages War On Pollution While Censoring Activists*. Dipetik Oktober 20, 2017, dari www.forbes.com
- KPMG China (2011). China's 12th Five Year Plan: Overview. *KPMG China*, 1-4.
- Liang, W. (2006). Understanding greenpeace campaigns in China: Empowerment and Mobilization. 121.
- Lu, Y. (2005). Environmental Civil Society and Governance in China. *Asia Programme*, 1-8.
- Lu, Y. (2005, Mei 1). The Growth of Civil Society in China: Key Challenges for NGOs.
- Manjula, S. (2016). Water Pollution by Industries: Causes and Consequences. *The World Journal on Juristic Policy*, 1-6.
- Mann, P. A. (2013). *Chinese Law Regarding International NGOs and Its Implementation: The Ford Foundation and Greenpeace*. Ohio: Ohio State University.
- Parameswari, P. (2016). Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok. *Dauliyah Journal of Islamic and International Studies Vol. 1 No.2*, 209-228.
- Perinova, M. (2005). Civil Society in Authoritarian Regime: The Analysis of China, Burma, and Vietnam. *LUP Student Papers*, 1-35.
- Price, R. (2003). Transnational Civil Society and Advocacy in World Politics. *World Politics*, 579-606.
- Schwartz, J. (2004). Environmental NGOs in China: Roles and Limits. *Pacific Affairs*, 28-49.
- Tang, F. (2016, Desember 10). *Planned protest against smog in southwest China shut down before it begins*. Diambil kembali South China Morning Post: www.scmp.com
- Wong, G. (2013). China's War on Water Scarcity. *PWC*, 1-9.
- World Bank. (2007). *Cost of Pollution in China: Economic Estimates of Physical Damages*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. (2007). *Water Pollution Emergencies in China: Prevention and Response*. Washington DC: The World Bank.
- Wu, F. (2009). Environmental Activism in China: Fifteen Years in Review 1994-2008. *Harvard-Yenching Institute Working Paper Series*, 1-15.
- Xiaochun, M., & Bianji. (2015, Maret 4). *Spreading water pollution causes heavy economic losses: report*. Dipetik November 25, 2017, dari <http://en.people.cn>
- Zhan, X., & Tan, S. Y. (2011). Political Opportunities, Resource Constraints, and Policy Advocacy of Environmental NGOs in China. *Departmental Research Fund for New Academic Staff*, 1-40.
- Zhang, Q., & Crooks, R. (2011). Environmental Strategy for the 12th Five Year Plan Period: What Can the People's Republic of China Learn from the 11th Year Plan. *ADB Briefs No.8*, 1-8.